

MODEL SOLUSI STRATEGIS INTEGRASI DAN KONVERGENSI LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MS, MSc
Dr. Ir. Rusda Khairati, MSi



KERJASAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOALISI
KEPENDUDUKAN INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG, 2022



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Model Solusi Strategis Integrasi Konvergensi Lintas Sektor Di Kampung Keluarga Berkualitas
2. Ketua Peneliti :
 - a) Nama : Prof. Dr.Ir. Rahmat Syahni, MS, MSc
 - b) NIP : 195704251981031003
 - c) Departemen : Sosial Ekonomi Pertanian
 - d) HP dan E-mail : 08126608869 dan rsyahni@yahoo.com
3. Waktu Pelaksanaan : Juli 2022 - November 2022
4. Anggota Peneliti : Dr. Ir. Rusda Khairati, MSi

Mengetahui:
Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Indra Dwipa, MS
NIP. 196502201989031003

Padang, 30 November 2022
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MS, MSc
195704251981031003

LAPORAN PENELITIAN

MODEL SOLUSI STRATEGIS INTEGRASI KONVERGENSI LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MS, MSc
Dr. Ir. Rusda Khairati, MSi



**KERJASAMA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
KOALISI KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG
2022**



KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah kita panjatkan ke hadhirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Penyusunan Model Solusi Strategis Dampak Kependudukan dengan judul “Integrasi dan Konvergensi Peran Lintas Sektor Dalam Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Sumatera Barat” yang dilaksanakan oleh Saudara Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MSc dan kawan-kawan dari Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat sudah selesai dirampungkan.

Kajian ini merupakan salah satu kegiatan penyusunan model solusi strategis yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2022. Kajian ini dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Penyusunan model ini diharapkan dapat membantu upaya dalam memanfaatkan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui keluarga yang berkualitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi integrasi dan konvergensi percepatan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas seperti yang diamantkan oleh Inpres No 3 Tahun 2022.

Terimakasih kami ucapkan kepada para peneliti dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Padang, 30 November 2022
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar

Fatmawati, ST, M.Eng.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat merampungkan laporan penelitian yang berjudul “Integrasi dan Konvergensi Lintas Sektor Dalam Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Sumatera Barat.” Laporan ini memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Sumatera Barat sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Ibu Fatmawati, ST, MEng, beserta jajarannya, atas dukungan yang telah diberikan kepada kami dalam pelaksanaan penelitian ini. Demikian juga kepada Bapak Bupati dan Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sebutan lain se Sumatera Barat yang telah memberikan fasilitasi dalam Fokus Group Discussion yang dilakukan pada masing-masing Kab/Kota.

Dengan segala keterbatasan, kami telah berupaya untuk melaksanakan penelitian dan penulisan laporan ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang objektif, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam menambah informasi dan wawasan pembaca untuk penyempurnaan berbagai kebijakan dan program, khususnya dalam mensukseskan upaya program Kampung Keluarga Berkualitas baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia.

Padang, 30 November 2022

Ketua Peneliti

Prof.Dr.Ir. Rahmat Syahni, MS, MSc

ABSTRAK

Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Kampung Keluarga Berkualitas harus dilaksanakan melalui kerjasama lintas sektor dalam mewujudkan kampung yang warganya memenuhi kriteria keluarga yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model solusi strategis untuk menghasilkan kinerja Kampung Keluarga Berkualitas. Data dan informasi dikumpulkan melalui Diskusi Terfokus (FGD) dengan lembaga-lembaga terkait pada seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, selama bulan Juni sampai bulan Oktober 2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas akan tercapai bila terdapat integrasi dan konvergensi lintas sektor dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas. Kerjasama dapat diwujudkan melalui komitmen bersama yang dihasilkan dari kesepakatan antara Pokja Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pokja Tingkat Desa/Nagari. Untuk itu direkomendasikan agar Pokja Tingkat Kabupaten/Kota bersama Pokja Tingkat Desa/Nagari dapat melahirkan komitmen bersama dalam bentuk Matriks Integrasi dan Konvergensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masing-masing Kampung Keluarga Berkualitas, dan berdasarkan matriks tersebut disusun Rencana Aksi Terpadu Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.

Kata kunci: kampung keluarga berkualitas, sinergi antar lembaga, matriks integrasi konvergensi

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	v
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
Bab 2. Tinjauan Pustaka	4
2.1. Kampung Keluarga Berencana.....	4
2.2. Kampung Keluarga Berkualitas.....	7
2.3. Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas.....	10
2.4. Kolaborasi Antar Lembaga	13
2.5. Sinergi Antar Lembaga	15
2.6. Integrasi dan Konvergensi	19
Bab 3. Metodologi Penelitian	25
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.2. Pengumpulan Data Penelitian.....	25
3.3. Analisis Data Penelitian.....	25
Bab 4. Hasil dan Pembahasan	27
4.1. Gambaran Umum Sumatera Barat.....	27
4.2. Gambaran Demografi Sumatera Barat.....	29
4.3. Gambaran Kampung Keluarga Berkualitas.....	33
4.4. Model Solusi Strategis Integrasi Konvergensi	37
4.5. Matriks Integrasi Konvergensi	41
4.6. Rencana Aksi Integrasi Konvergensi	42
4.7. Tanggungjawab Kelompok Kerja.....	44

Bab 5. Kesimpulan dan Saran.....	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	47
Daftar Pustaka.....	48

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Judul</u>	<u>Hal</u>
4.1.	Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021	31
4.2.	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Sudah Terbentuk di Sumatera Barat Tahun 2022.....	34
4.3.	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Menurut Klasifikasi di Sumatera Barat Tahun 2022.....	35
4.4.	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Menurut Keterlibatan Lintas Sektor di Sumatera Barat Tahun 2022.....	36
4.5.	Matriks Integrasi Konvergensi Program/Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB	41

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Judul</u>	<u>Hal</u>
2.1	Ruang Lingkup Program Kampung Keluarga Berencana	5
2.2	Peran Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Mencapai Keluarga Berkualitas.....	9
2.3	Peran dan Tanggung Jawab Kementerian/Lembaga Dalam Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas	11
2.4	Integrasi dan Konvergensi Dalam Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.....	21
4.1	Peta Administratif Provinsi Sumatera Barat.....	27
4.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021.....	30
4.3	Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	32
4.4	Model Integrasi Konvergensi Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas	39
4.5	Keterlibatan Lintas Sektor Dalam Program Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas.....	40
4.6	Matriks Integrasi Konvergensi Program/Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB...	41

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kampung Keluarga Berkualitas adalah nama baru dari Kampung Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon, dan disusul dengan SE Mendagri No. 440/70/SJ tahun 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana. Kampung Keluarga Berencana berubah nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan SE Mendagri No. 843.4/2879/SJ tahun 2020 perihal Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, dan terakhir diperkuat oleh Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung Keluarga berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa/nagari dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan gambaran dari sebuah desa/nagari yang didalamnya terdapat keterpaduan program pembangunan Bangga Kencana yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Tujuan umum Kampung Keluarga Berkualitas adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta program pembangunan sektor terkait lainnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Sedangkan tujuan khusus Kampung Keluarga Berkualitas adalah meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

Keluarga berkualitas yang ingin dicapai diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan dimensi yang meliputi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Dimensi ketenteraman diukur dengan: adanya akses beribadah, adanya jaminan kesehatan, kepemilikan dokumen nikah, kepemilikan dokumen kelahiran, tidak terdapatnya konflik keluarga, dan tidak adanya kasus perceraian. Sementara dimensi kemandirian diukur dengan: ketersediaan dan akses terhadap pangan, kondisi rumah yang layak, kondisi lingkungan yang

baik, adanya tabungan keluarga, tidak terdapatnya anggot akeluarga yang piutus sekolah, kesehatan anggota keluarga yang baik, tidaka adanya kasus stunting dalam keluarga, dan adanya akses terhadap informasi. Sedangkan dimensi kebahagiaan diukur dengan: kualitas interaksi yang terdapat dalam keluarga, kualitas interaksi keluarga dengan masyarakat, dan kondisi lingkungan keluarga yang bersangkutan.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan keluarga berkualitas merupakan dasar untuk pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Bila pada awalnya Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya penguatan program Bangga Kencana dan sekaligus pemberdayaan masyarakat, maka sebagai kampung keluarga berkualitas, pengertian ini menjadi lebih luas. Tujuan utama yang semula adalah untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pemberdyaan masyarakat, berubah menjadi pembangunan masyarakat yang berfokus pada pembangunan keluarga dengan melibatkan lintas sektor yang terkait.

Keberhasilan pembangunan keluarga berkualitas diukur dengan indeks pembangunan keluarga (iBangga) dengan dimensi tiga dimensi yang telah disebutkan diatas, merupakan ukuran yang luas dan berskala lintas sektor. Dari ukuran kinerja ketiga dimensi keluarga berkualitas tersebut, dapat dilihat bahwa upaya mewujudkan keluarga berkualitas dengan indeks iBangga yang tinggi tidak akan dapat dicapai melalui satu atau dua setor saja, namun dituntut keterlibatan banyak sektor. Pada dimensi kemandirian, terlibat sektor agama, asuransi kesehatan, kependudukan, catatan sipil, dan pengadilan agama. Pada dimensi kemandirian terlibat sektor pertanian, perumahan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, eknomi, dan informasi dan komunikasi. Sedangkan pada dimensi kebahagiaan terlibat sektor agama, sosial, dan budaya.

Keterlibatan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembangunan di kampung keluarga berkualitas. Diantara organisasi yang terkait langsung dengan pembangunan di kampung keluarga berkualitas adalah: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Kantor Kementerian Agama.

Sesuai dengan tujuan kampung keluarga berkualitas, kolaborasi antar organisasi pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Kampung keluarga Berkualitas dirancang sebagai sebuah wadah gerakan bersama membangun kesadaran kolektif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Pelibatan banyak pihak akan memberikan hasil yang optimal bila terdapat sinergi antar semua pihak yang terkait sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing. Sinergi adalah membangun hubungan kerjasama yang produktif, serta kemitraan yang harmonis para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan kinerja yang bermanfaat dan berkualitas. Hal ini akan tercapai bila semua organisasi terintegrasi menjadi sebuah kesatuan yang utuh untuk bertindak secara konvergen pada sebuah lokasi yang disebut kampung keluarga berkualitas. Diperlukan sebuah rancangan dalam mewujudkan integrasi dan konvergensi lintas sektor di kampung keluarga berkualitas. Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, permasalahan yang ingin dijawab dalam hal ini adalah

1. Bagaimana perkembangan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat.
2. Bagaimana model strategis integrasi konvergensi lintas sektor untuk mengoptimalkan pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian dirumuskan untuk:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat.
2. Mengidentifikasi model solusi strategis integrasi konvergensi lintas sektor pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kampung Keluarga Berencana

Kampung Keluarga Berkualitas pada awalnya adalah Kampung Keluarga Berencana. Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon, kemudian ditindaklanjuti dengan SE Mendagri No. 440/70/SJ tahun 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana. Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (BKKBN, 2015).

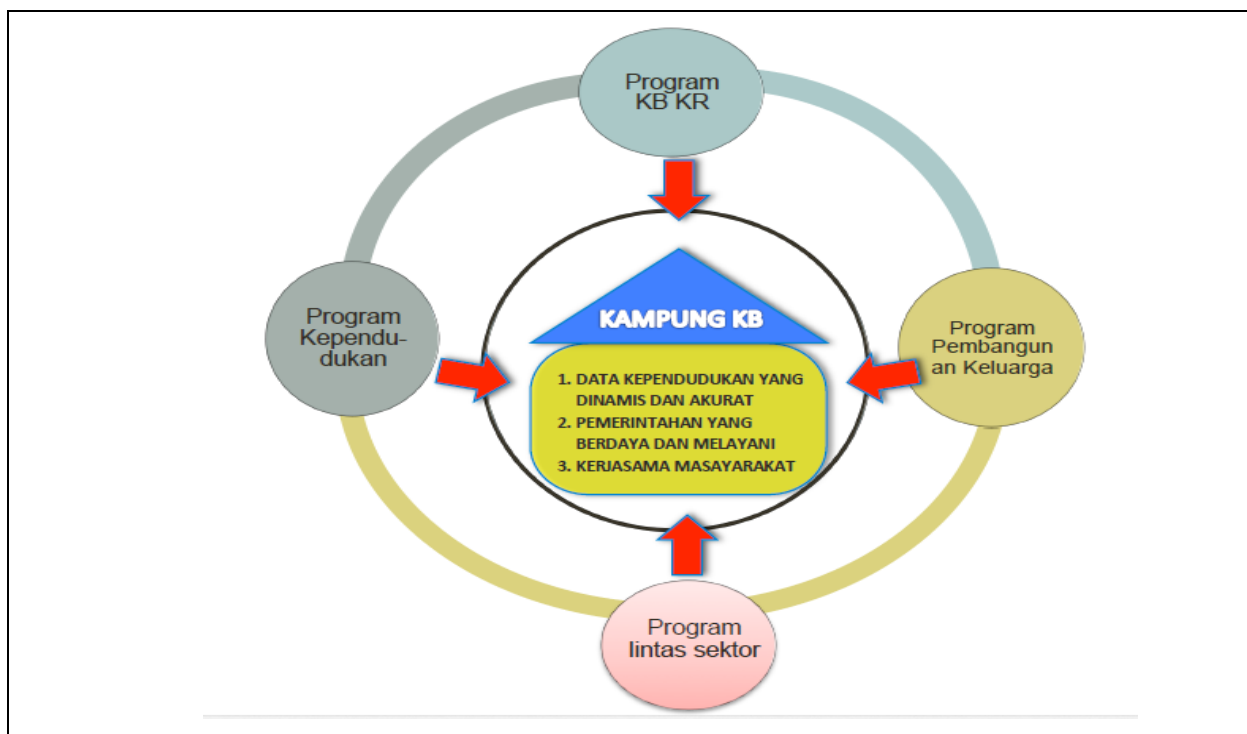
Kriteria pemilihan Kampung Keluarga Berencana diutamakan adalah daerah miskin, padat penduduk, dan kurang akses ke sarana kesehatan. Sampai akhir tahun 2021 sudah terbentuk sebanyak 387 Kampung Keluarga Berencana di Sumatera Barat. Kampung Keluarga Berencana bertujuan untuk membumikan secara total program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dan memberikan bagi para penanggungjawab dan pengelola Program KKBPK di tingkat kecamatan dan desa.

Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pelayanan program KKBPK sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2015). Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Selain bertujuan untuk memusatkan pengendalian jumlah penduduk, kampung KB juga merupakan wadah sasaran dalam menggulangi masalah kemiskinan dalam wilayah terkecil atau wilayah pinggiran. Pada Kampung KB terdapat program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

Proses penentuan lokasi kampung KB memperhatikan persyaratan wajib, yaitu: tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Data kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota (Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Ruang Lingkup Program Kampung Keluarga Berencana



Sumber: BKKBN 2015

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat di wilayahnya.

Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (BKKBN, 2015). Kedua kriteria utama tersebut adalah: Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada. Kemudian jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi. Setelah terpenuhi dua kriteria utama tersebut maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut, yaitu: kumuh, pesisir/nelayan, daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan padat penduduk.

Pembentukan Kampung KB diawali dengan penyiapan kelengkapan awal Perwakilan BKKBN Provinsi setelah suatu wilayah ditentukan sebagai lokasi Kampung KB sesuai kriteria pembentukan kampung KB. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah: membangun komitmen, menyusun profil wilayah, menetapkan wilayah kampung KB, dan menyediakan data dan informasi (BKKBN, 2015)

Keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu: 1) Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (kabupaten, kecamatan, Desa dan kelurahan); 2) Intensitas opini publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor; 3) Opimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; 4) Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB), dan 5) partisipasi aktif dari masyarakat pada wilayah tersebut.

Kampung KB merupakan kegiatan strategis mengingat program tersebut merupakan salah satu program prioritas pembangunan (nawacita) pemerintah periode 2015-2019 pada agenda prioritas nomor tiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan nawacita nomor lima yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”. Melalui Kampung KB diharapkan dapat diwujudkan komitmen para pemangku kepentingan, terutama untuk keterpaduan program yang semakin meningkat sehingga program pembangunan bisa terlaksana. Sebagai program terobosan, Kampung KB tidak saja diharapkan dapat menguatkan Program KKBPK, tetapi juga guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga kedepan masyarakat dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Melalui Kampung Keluarga Berencana, diharapkan akan muncul keluarga-keluarga yang berkualitas yang menghasilkan generasi-generasi cemerlang yang berguna bagi masa depan bangsa (YCCP, 2017).

2.2. Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas adalah nama baru untuk Kampung Keluarga Berencana. Kampung Keluarga Berencana berubah nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas pada tahun 2020 dengan SE Mendagri No. 843.4/2879/SJ tahun 2020 perihal Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas diperkuat oleh Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa/nagari dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta program pembangunan sektor terkait lainnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Sedangkan tujuan khusus Kampung Keluarga Berkualitas adalah meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

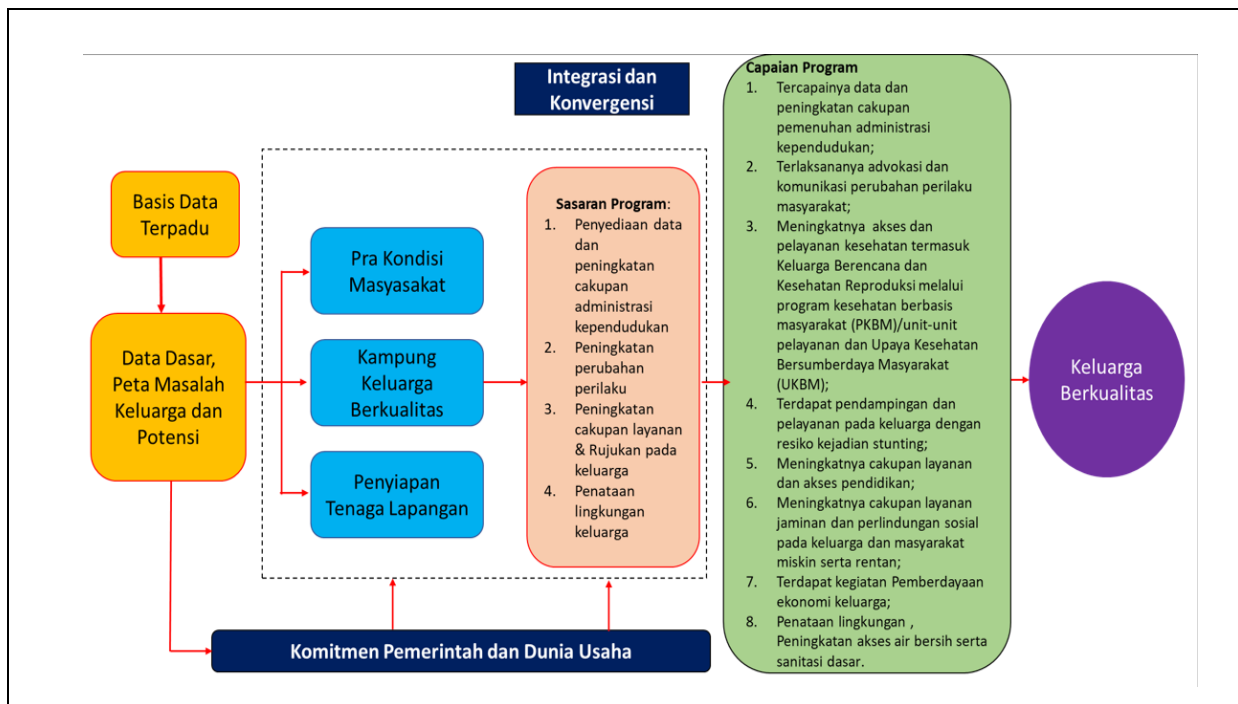
Perubahan nama dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas adalah untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami kewenangan organisasi perangkat daerah. Dengan nama Kampung Keluarga Berencana, organisasi perangkat daerah beranggapan bahwa program ini tidak termasuk kewenangan mereka. Namun dengan nama Kampung Keluarga Berkualitas, program ini menjadi kewenangan bersama organisasi perangkat daerah yang terkait. Apalagi setelah diperkuat oleh Instruksi Presiden No. 3 tahun 2022, dimana secara eksplisit disebutkan sektor-sektor yang terkait dalam program Kampung Keluarga Berkualitas.

Program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan sebuah inovasi untuk membangun masyarakat dengan berpusat kepada keluarga. Pembangunan keluarga berkualitas merupakan dasar untuk pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Bila pada awalnya Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya penguatan program Bangga Kencana dan sekaligus pemberdayaan masyarakat, maka sebagai kampung keluarga berkualitas, pengertian ini menjadi lebih luas, yaitu pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas melalui pembangunan berbagai sektor terkait secara terintegrasi. Program ini mempunyai dampak ganda, selain pembangunan keluarga, juga pembangunan sektor-sektor lain yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hasil pembangunan keluarga juga pada akhirnya akan melahirkan generasi yang berkualitas.

Tujuan utama yang semula adalah untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat, berubah menjadi pembangunan masyarakat yang berfokus pada pembangunan keluarga. Keluarga merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2007). Keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, mental spiritual, dan nilai-nilai agama sebagai dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (UU Nomor 52 tahun 2009).

Gambar 2.2. Peran Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Mencapai Keluarga Berkualitas



Sumber: Kementrian PMK

Pencapaian tujuan pembangunan keluarga berkualitas diwujudkan melalui capaian-capaian program berupa tercapainya data dan peningkatan cakupan pemenuhan administrasi kependudukan, terlaksananya advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat/unit unit pelayanan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, terdapatnya pendampingan pelayanan pada keluarga

yang beresiko stunting, meningkatnya cakupan layanan dan akses pendidikan, meningkatnya cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin dan rentan, terdapatnya kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga, penataan lingkungan, penataan akses air bersih, dan sanitasi dasar (Gambar 2.2).

2.3. Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas

Secara resmi dan eksplisit penguatan Kampung Keluarga Berkualitas diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Inpres ini menginstruksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Inovasi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa PDTT, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BKKBN, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri P3A, Kepala BKKBN, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui: 1) penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, 2) perubahan perilaku keluarga, 3) peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, dan 4) penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keempat sasaran yang diamanatkan Inpres tersebut di atas dicapai melalui delapan program Pembangunan Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan secara terintegrasi pada Kampung Keluarga Berkualitas, yaitu: 1) Program Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan, 2) Program Penguatan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat & Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat, 3) Program Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 4) Program Pendampingan dan Pelayanan Keluarga Beresiko Stunting, 5) Peningkatan Cakupan dan Akses Pendidikan, 6) Program Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan dan Perlindungan Sosial, 7) Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan 8) Program Penataan Lingkungan Keluarga, dan Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Dasar.

Setiap kementerian mendapat tugas khusus untuk melaksanakan koordinasi dan dukungan untuk optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan menjadi tanggungjawab BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan PDTT. Perubahan perilaku keluarga menjadi tanggung jawab BKKBN, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga menjadi tanggungjawab BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR dan Kementerian Desa dan PTT (Gambar 2.3).

Gambar 2.3. Peran dan Tanggung Jawab Kementrian/Lembaga Dalam Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas



Sumber: Kementerian PMK

Terkait langsung dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab: a) mendorong komitmen Gubernur Bupati/Walikota dalam optimalisasi

penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, b) memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta penggunaan APBD Desa, c) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, d) memfasilitasi Tim Pengegerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, e) mendukung sasaran program penyediaan data dan dokumen kependudukan, peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga, dan peningkatan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sementara BKKBN mendapat tugas: a) pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di wilayah setingkat desa/kelurahan, b) fasilitasi teknis penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga, c) pengoordinasian dan peningkatan pelibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan keluarga dan penguatan institusi, d) pengoordinasian penyusunan indikator pedoman keberhasilan keluarga pelaksanaan dan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, e) pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) setiap setahun sekali dan f) pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Gubernur mendapat tugas melalui a) pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; b) penguatan komitmen Bupati/Wali Kota untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga; c) pembinaan dan pengawasan baik secara umum maupun teknis terhadap penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kabupaten/ Kota di wilayahnya; d) pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat; e) pelaporan

pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; f) pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan g) fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Para Bupati/Wali Kota mendapat amanat untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui: a) pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga; b) penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik di wilayahnya masing-masing dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; c) pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau sektor swasta serta unsur masyarakat; d) pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Gubernur 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; e) pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui pembentukan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan f) fasilitasi Tim Penggerak PKK di wilayahnya dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

2.4. Kolaborasi Antar Lembaga

Pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas membutuhkan kerjasama atau kolaborasi antar sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan desa/nagari, dunia usaha, dan masyarakat umum. Kolaborasi yang optimal akan melahirkan sinergi yang menghasilkan kinerja yang tinggi yang dapat diukur dengan indeks pembangunan keluarga yang tinggi. Dengan demikian kolaborasi dalam program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan kebutuhan yang harus dikelola dengan baik.

Secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari kata "co-labour" yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008).

Kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010), kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Kolaborasi merupakan upaya pengumpulan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak (Simatupang dan Sridharan, 2008). Sedangkan menurut Leever (2010) menyatakan bahwa kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan. Kedua definisi tersebut, menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan jalan keluar dari keterbatasan yang dialami oleh individu atau organisasi bila pencapaian tujuan dilakukan secara individual atau sendiri sendiri.

Kolaborasi menurut Schrage dalam Aggranoff dan McGuire (2003) adalah hubungan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menciptakan solusi dalam kondisi keterbatasan misalnya keterbatasan informasi, waktu dan ruang. Sedangkan Grey dalam Fendt (2010) menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses adanya kesadaran dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Raharja (2008)

juga mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual.

Menurut Fendt (2010) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu: 1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain. 2) Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri, 3) Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa, organisasi yang pada awalnya adalah organisasi yang bersifat independen dan otonom, namun pada tahap perkembangannya organisasi memerlukan kolaborasi karena berbagai keterbatasan dalam mencapai tujuan.

2.5. Sinergi Antar Lembaga

Aksi konvergensi penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan aktivitas bersama antara berbagai lembaga, baik dari pemerintahan maupun dari swasta, yang diharapkan tidak hanya memberikan hasil sebagai akumulasi dari aktivitas masing-masing lembaga, namun memberikan hasil yang lebih baik dari itu. Aksi konvergensi juga diharapkan memberikan hasil yang tidak mungkin dicapai oleh masing-masing lembaga bekerja secara individual. Oleh sebab itu aksi konvergensi tidak hanya membutuhkan kolaborasi antar lembaga, tetapi lebih dari itu membutuhkan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam aksi tersebut.

Sinergi berasal dari bahasa Yunani “*synergos*” yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Pengertian sinergis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh

mereka secara individual. Dengan demikian, sinergi terjadi apabila hasil dari gabungan misalnya dua kekuatan akan menghasilkan hasil lebih besar dari 2. Menurut Goold dan Campbell (2000) dalam sebuah akuisisi diharapkan nilai perusahaan yang digabungkan melebihi jumlah dari nilai unit yang terpisah.

Sinergi didefinisikan oleh Gupta dan Roos (2001) sebagai interaksi dua atau lebih sumber daya modal intelektual dari organisasi yang sebelumnya sendiri sendiri, yang meningkatkan efek gabungan dari penciptaan nilai dan kinerja kompetitif, efek yang lebih besar dari jumlah efek individu. Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang dengan tangan tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan.

Sinergi menurut Covey (1987) adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergi akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”

Menurut Corning (1995) sesungguhnya sinergi ada dimana-mana di sekitar kita termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, batu dapat digunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah, tembok, jalanan, dan sebagainya. Namun demikian, tanpa adanya semen dan usaha manusia maka batu-batu tadi hanya menjadi tumpukan batu belaka yang tidak banyak gunanya. Contoh lain, mobil modern terdiri dari kira-kira 15.000 komponen yang dirancang secara khusus dan

dibuat dari 60 jenis bahan yang berbeda. Akan tetapi, jika sebuah rodanya dicopot maka mobil ini menjadi tidak dapat bergerak. Dua contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya sinergi. Tanpa ada sinergi dengan komponen yang lain maka komponen-komponen yang ada tidak dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar seperti yang diinginkan.

Di samping itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk dapat bertahan hidup maka manusia harus berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Hubungan antar manusia ini merupakan bentuk sinergi yang bersifat eksternal yang penting untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia karena tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendirian saja. Pada tingkatan organisasi sinergi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

Sinergi sebagai sebuah konsep bebas-konten, artinya sinergi menunjukkan efek yang lebih kuat atau hasil dari interaksi entitas yang berbeda atau input dari pada yang dapat dicapai oleh entitas individual (Munro, 2005). Sinergi dapat disengaja atau direncanakan tetapi ada kemungkinan sinergi diidentifikasi dalam retrospeksi walaupun dalam definisi sinergi belum dikelola atau diatur. Sebagai contoh, dua proyek yang terpisah mungkin saling bermanfaat satu dengan lainnya, tetapi dapat berinteraksi pada tingkat yang sederhana dan menghasilkan lebih besar dari melalui dua efek.

Dalam hal ini pembahasan fokus pada sinergi yang direncanakan yang bertujuan mempromosikan sinergi atau meningkatkan potensi pencapaiannya. Mengelola keterlibatan untuk mempromosikan sinergi berarti berencana untuk interaktivitas antar inisiatif, artinya interaksi dua atau lebih kegiatan saling mempengaruhi satu dengan lainnya akan menimbulkan isu yang memiliki control atas entitas / inisiatif yang perlu berinteraksi. Untuk alasan ini, penting untuk membedakan berbagai jenis sinergi dan pihak-pihak yang saling berinteraksi. Peran dan pengaruh aktor/pelakunya yang melaksanakan sinergi juga penting, karena melalui pemilahan ini konsep sinergi dapat lebih mudah dipahami termasuk konten operasional yang tepat, nilai dalam konteks yang berbeda, dan potensi trade-off terkait dengan pelaksanaannya.

Beberapa jenis utama dari sinergi yang relevan dengan konteks sinergitas kelembagaan (Harrison, 1991) adalah: sinergi organisasi, sinergi kebijakan, dan sinergi operasional. Sinergi organisasi adalah dua organisasi yang berbeda menggabungkan aset dan keterampilan untuk mempengaruhi satu dengan lainnya dan menghasilkan efek kelembagaan yang signifikan bagi mereka. Banyak pembahasan dari berbagai jenis sinergi muncul dari domain perusahaan dan berfokus pada sinergi yang mungkin terjadi ketika bisnis bergabung. Salah satu bidang utama sinergi yang terlihat dapat dicapai adalah melalui interaksi dari aset modal dua atau lebih bisnis (Chatterjee, 1986).

Sinergi kebijakan adalah untuk mencapai lebih besar dari dampak yang diharapkan dengan menggabungkan posisi kebijakan dan mempengaruhi strategi dengan cara yang interaktif. Sinergi kebijakan dapat dilihat dalam interaksi berbagai organisasi/instansi (baik bilateral maupun multilateral) untuk mempromosikan tujuan tingkat global atau negara atau daerah (regional) tertentu. Sedangkan Sinergi operasional adalah menggabungkan program atau inisiatif secara interaktif untuk mencapai efek yang lebih besar daripada kegiatan proyek atau program per individual termasuk hasil yang mereka harapkan.

Dari uraian tersebut di atas sinergi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tergabung perlu memperhatikan potensi keterkaitan yang penting baik ke belakang maupun ke depan untuk mencapai efektivitas maksimum. Penekanan arah hubungan sinergi operasional dapat juga muncul melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama jika mereka berinteraksi secara positif. Menurut Waco and Wery (2004) kunci keberhasilan sinergi terletak pada perusahaan yang melakukan diversifikasi dalam hal pembagian kerja, tanggung jawab manajemen dan pengembangan proses seluruh unit bisnis dan daerah.

Sinergitas kelembagaan adalah pengaturan kelembagaan sosial dalam berinteraksi sangat erat dengan lembaga-lembaga negara untuk lebih baik atau lebih buruk. Tindakan pemerintah dapat menjadi konstruktif dan destruktif yang berkaitan dengan masyarakat sipil. Lembaga formal struktur pemerintahan dan kebijakan publik memiliki pengaruh besar pada kualitas hidup masyarakat dan institusi sosial informal merupakan sumber penting untuk memajukan kepentingan mereka. Keberadaan institusi lokal sebagai faktor penting dalam

memfasilitasi pengembangan komunitas dan memberikan masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dan sering mewakili kepentingan umum dari orang-orang di daerah tersebut.

Kemitraan yang terstruktur dengan tepat antara asosiasi, masyarakat dan pemerintah daerah dapat memberikan dasar untuk penguatan kelembagaan di tingkat lokal (Krishna, 2003). Dengan demikian, lembaga mencapai keseimbangan antara efisiensi dan legitimasi, eksperimen tingkat lokal dan adaptasi akan diperlukan. Fokusnya harus pada proses yang membina hubungan baik pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat secara bersama-sama. Mekanisme yang memungkinkan berbagai pihak untuk saling memberikan kontribusi akan menciptakan umpan balik positif yang dapat menyebabkan perbaikan yang signifikan dalam pemerintahan

Hubungan yang terjadi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat dilihat dari bagaimana mekanisme kelembagaan yang dibangun dapat menunjukkan titik persamaan. Titik persamaan inilah yang memungkinkan munculnya sinergi antar lembaga, dimana saling terjadi kerja sama antar lembaga yang diakibatkan adanya komitmen dan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat adalah agenda yang realistis dan sangat mungkin diwujudkan dan dapat dicapai melalui banyak cara, antara lain melalui program yang dapat dikerjakan oleh mereka dalam rangka memperbesar dan memperluas peran dan partisipasi masyarakat (Munawar, 2017).

2.6. Integrasi dan Kovergensi

Aksi Integrasi dan Konvergensi penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan aktivitas kolaborasi antara berbagai lembaga, baik dari pemerintahan maupun dari swasta, yang diharapkan tidak hanya memberikan hasil sebagai jumlah akumulatif dari aktivitas semua pemangku kepentingan, tetapi lebih dari itu memberikan dampak interaksi dan sinergi yang dihasilkan dari kegiatan bersama secara kolaboratif yang ditujukan secara konvergen pada suatu titik sasaran yang disebut Kampung Keluarga Berkualitas.

Integrasi memiliki cakupan yang luas, namun secara sederhana integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau

bulat. Integrasi juga berarti metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Integrasi berarti suatu cara untuk kerja sama yang tidak saling bertentangan demi mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati bersama. Integrasi adalah pembauran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektor dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Demikian pula integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Konvergensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Konvergensi adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir terpadu dan bersama sama untuk mencapai tujuan yang sama menyangkut kelompok sasaran prioritas yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konvergensi adalah suatu pengarahan dari berbagai aktivitas untuk menanggulangi masalah secara bersama sama pada titik sasaran yang sama. Seperti halnya integrasi, konvergensi juga akan memberikan dampak ganda terhadap kinerja bersama akibat adanya sinergi yang terjadi dari berbagai komponen yang menuju pada suatu titik sasaran.

Integrasi dan konvergensi berarti terpadu dan memusat. Dalam konteks Kampung Keluarga Berkualitas aksi integrasi dan konvergensi dapat diartikan sebagai pemaduan berbagai sektor atau lembaga untuk bersama-sama berkolaborasi secara sinergis melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing menuju suatu titik sasaran yaitu Kampung Keluarga Berkualitas. Integrasi dan Konvergensi diperlukan dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas karena hampir setiap kementerian atau lembaga memiliki program dan kegiatan di desa dengan output untuk meningkatkan kualitas keluarga. Integrasi dan Konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas mempunyai tujuan untuk memadukan peran dan kontribusi setiap kementerian dan lembaga dan lintas sektor dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (BKKBN, 2022).

Pelaksanaan Rencana Aksi Program Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan secara terkoordinir dibawah Pokja Tingkat Kab/Kota. Pelaksanaan Aksi Integrasi dan Konvergensi meliputi tahapan: 1) Analisis Situasi, 2) Perencanaan Kegiatan, 3) Rapat Koordinasi, 4)

Dukungan Pedoman Regulasi, 5) Pembinaan Kader, 6) Manajemen Data, 7) Review Kinerja Tahunan, dan 8) Pengukuran Keberhasilan Kampung KB (Yosrizal, 2022).

Gambar 2.4. Integrasi dan Konvergensi Dalam Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas



Sumber: BKKBN 2022

Analisis situasi dilakukan untuk mendapatkan pemetaan situasi dan kondisi masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pihak di Kampung Keluarga Berkualitas. Analisis situasi menggambarkan wilayah berdasarkan kondisi Kampung Keluarga Berkualitas meliputi jumlah penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, perlindungan sosial, dan administrasi kependudukan.

Perencanaan kegiatan pada masing-masing lembaga mengacu kepada analisis situasi dan sesuai dengan lampiran Inpres No. 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Penyusunan Rencana Aksi sebagai pola operasional

pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga serta lintas sektor terkait program/kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Inpres tersebut yaitu 8 program/kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Bappeda mempunyai peran yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota terutama program lintas sektor untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.

Rapat koordinasi berfungsi sebagai wadah sinkronisasi dan konvergensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas. Pelaksanaan rapat koordinasi ditingkat pusat dipimpin oleh Kementerian PMK yang dihadiri oleh Kementerian/lembaga sesuai dengan Inpres no. 3 tahun 2022. Pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota, dan di tingkat desa dipimpin oleh Kepala Desa. Peserta rapat koordinasi di daerah terdiri dari lintas sektor terkait dan mitra strategis sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah. Rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama semua pemegang kepentingan untuk bersama sama melakukan aktivitas membangun Kampung Keluarga Berkualitas.

Dukungan regulasi diperlukan sebagai payung hukum untuk menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat nasional sudah ada payung hukum dalam bentuk Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang “Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” sebagai payung hukum untuk kementerian dan lembaga dalam mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan integrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga. Pada tingkat daerah, regulasi dalam bentuk keputusan kepala daerah untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di daerah. Pada tingkat desa disusun peraturan desa sebagai dasar optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas.

Masing-masing kementerian/lembaga atau sektor terkait menunjuk kader binaan yang akan berkoordinasi dengan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas. Masing-masing kementerian/lembaga melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kadernya dan kepada organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Pendampingan dan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah dan kader binaan masing-masing kementerian/lembaga dapat dilakukan melalui berbagai metode antara lain pelatihan, lokakarya, asistensi, dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.

Untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas, perlu dikembangkan sistem manajemen data berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini BKKBN sudah mengembangkan website untuk sistem manajemen data di Kampung Keluarga Berkualitas. Melalui website tersebut, perkembangan setiap Kampung Keluarga Berkualitas dapat dipantau secara real time oleh masing-masing kementerian/lembaga. Pelaporan perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas secara berkala mutlak dibutuhkan untuk menjaga agar data yang dibutuhkan dalam monitoring dan evaluasi selalu diperbarui.

Review kinerja optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terencana baik dari sisi pelaksana, metode, serta manfaat monev bagi upaya perbaikan program. Pelaksanaan monev dilakukan oleh tim yang dibentuk instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara pemantauan dengan website Kampung Keluarga Berkualitas, melalui forum pertemuan, atau melalui kunjungan langsung ke lapangan. Temuan pada saat monitoring merupakan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi program. Hasil temuan ditindak lanjuti dengan penyesuaian, perbaikan, ataupun perubahan dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan peningkatan kualitas keluarga dapat dicapai.

Indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas dilihat dari outcome atau dampak pembangunan keluarga melalui indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang diukur setiap tahun. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu ukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga

yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga melalui pendataan keluarga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional sangat bermanfaat untuk mengevaluasi dan mempublikasikan capaian yang telah diperoleh dalam pembangunan keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dimulai sejak penugasan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sumatera Barat pada bulan Juli 2022. Kegiatan penelitian berlangsung selama 5 bulan dari bulan Juli sampai November 2022. Penelitian dilakukan dengan tahapan: *focus group discussion*, pengumpulan data dan informasi, analisis data, penulisan laporan penelitian, dan penulisan *policy brief*. Lokasi penelitian adalah provinsi Sumatera Barat.

3.2. Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dan informasi berupa pengalaman dan best practice kebijakan yang telah diselenggarakan oleh daerah penelitian, terutama dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berencana sebelum berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Data dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, dilengkapi dengan review literatur. Data primer berupa data dan informasi yang dikumpulkan langsung dari pihak-pihak terkait yang telah ikut terlibat dalam pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas/keluarga berencana di Kabupaten/Kota. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dipublikasi oleh BKKBN dan pemerintah Daerah Kab/Kota melalui website, media massa, dan bahan presentasi dalam forum-forum rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Selain itu data dan informasi juga diperoleh dari literatur baik teori kolaborasi, sinerga, maupun integrasi dan konvergensi.

3.3. Analisis Data Penelitian

Untuk mencapai tujuan pertama dilakukan analisis data yang dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas sejak awal terbentuk berupa Kampung Keluarga Berencana sampai menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Untuk mencapai tujuan kedua analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan membandingkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam aksi konvergensi yang telah

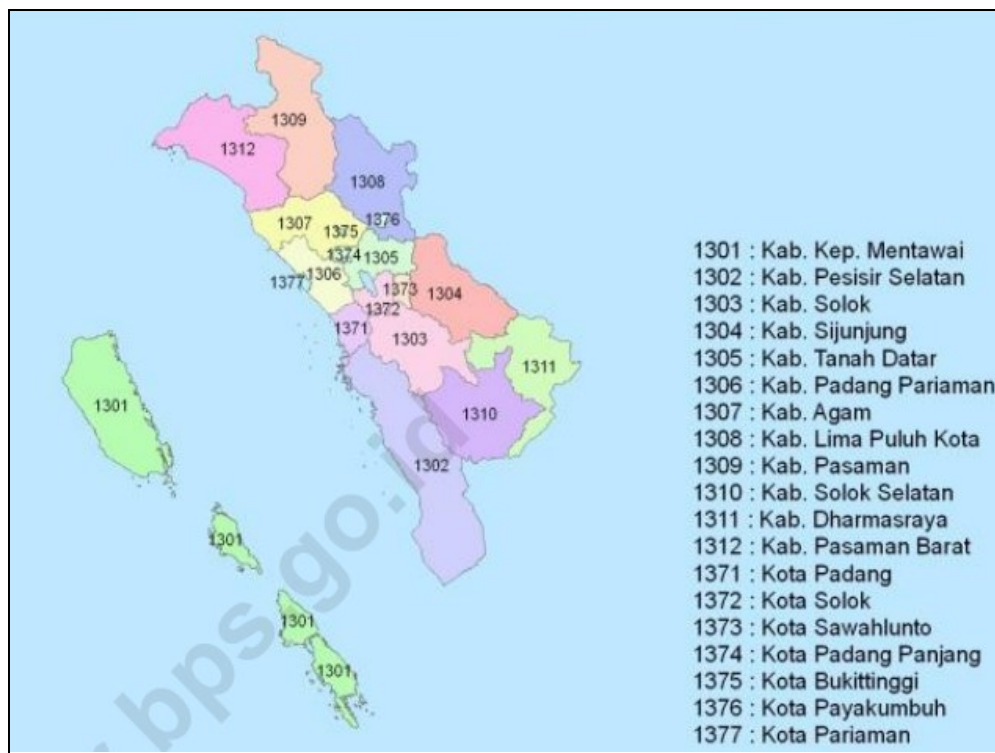
dilakukan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah dilaksanakan oleh sektor-sektor terkait dengan merujuk kepada teori kolaborasi dan teori senergi antar lembaga. Demikian juga pemikiran para peserta dari berbagai lembaga lintas sektor mengenai Kamoung Keluarga Berkualitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat berada di 98° 36'-101° 53' Bujur Timur, antara 0° 54' Lintang Utara sampai dan 3° 30' Lintang Selatan, luas daratan ± 42.297,30 Km², luas perairan ± 52.882,42 Km², dengan panjang garis pantai ± 1.378 Km yang terdiri dari garis pantai wilayah daratan dan garis pantai Kepulauan Mentawai. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dengan 179 Kecamatan, 259 Kelurahan, dan 760 Nagari. Provinsi Sumatera Barat berbatasan di sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Peta administratif Provinsi Sumatera Barat terlihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Peta Administratif Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,78°C dan rata-rata kelembaban 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Dengan kondisi topografi tersebut, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaannya dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan pada kawasan perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat menjadi gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, dan pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Selain itu secara geologis Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk pemukiman maupun industri. Namun demikian tidak semua wilayah daratan dapat dimanfaatkan karena hampir sekitar 54% wilayah Sumatera Barat adalah kawasan hutan termasuk di dalamnya hutan lindung. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, pengembangan fasilitas publik, dan peruntukan lahan untuk pemukiman penduduk, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

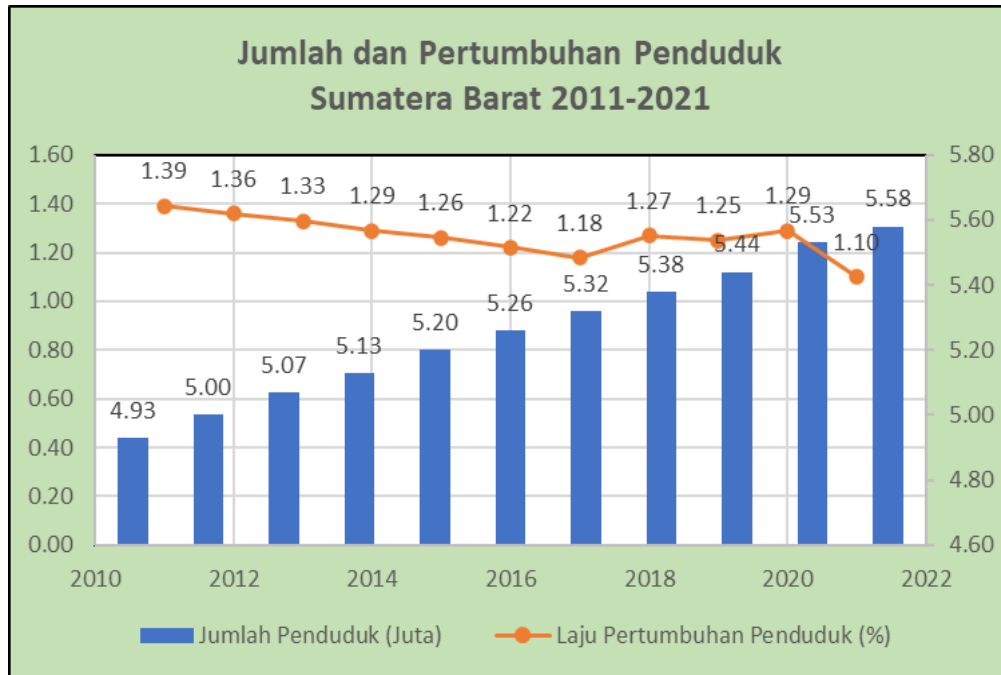
4.2. Gambaran Demografi Provinsi Sumatera Barat

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, dimana secara universal penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Menurut sensus penduduk dan survey penduduk antar sensus (SUPAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik, BPS, jumlah penduduk adalah semua orang yang dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Hasil sensus yang sudah dilaksanakan menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat, baik laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan, walaupun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun sebagaimana digambarkan oleh Gambar 4.2.

Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2021 berjumlah 5.558.232 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.810.407 jiwa dan perempuan 2.769.825 jiwa dengan sex ratio sebesar 101,47%. Jumlah ini selalu meningkat setiap tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2010 sebanyak 4.846.909 jiwa, dalam waktu sebelas tahun terakhir pada priode 2010–2021 telah terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 711.323 jiwa atau rata-rata 64.666 jiwa pertahun. Walaupun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan, dengan penurunan yang tinggi pada priode 1971-1980 dengan LPP 2,21 %, kemudian menurun menjadi 1,61 % pada priode 1980-1990 dan 0,61 % pada priode 1990-2000. Sebaliknya pada priode 2000-2010 terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,34.%, dan sedikit menurun pada priode 2010–2015 yaitu 1,33%. Salah satu penyebab masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat karena masih tingginya angka kelahiran per perempuan usia produktif 15-49 tahun (*Total Fertility Rate*) untuk kondisi tahun 2017, menunjukkan angka kelahiran total yaitu sebesar 2,5 kelahiran (SDKI, 2017).

Selain itu, perbandingan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, terlihat bahwa provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke lima se Sumatera.

Gambar 4.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021



Sumber Data: Sumatera Barat Dalam Angka 2011 sampai 2022, data diolah

Laju pertumbuhan penduduk tahunan menunjukkan penurunan dari tahun 2010 sampai 2017, yaitu dari 1.39% menurun menjadi 1.18% pada tahun 2017. Namun dari tahun 2017 terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk kembali mencapai 1.29% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk kembali menurun mencapai titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu mencapai 1.10%.

Selanjutnya distribusi jumlah penduduk Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota tidak merata. Tiga kabupaten/kota yang jumlah penduduknya terbanyak adalah Kota Padang, dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 913.448 jiwa atau 16,37 % dari jumlah penduduk provinsi Sumatera Barat, sedangkan luas wilayahnya hanya 1,65 % saja, sehingga kepadatan penduduknya cukup tinggi yaitu sebesar 1.315 jiwa/km². Jumlah Penduduk terbanyak kedua adalah kabupaten Agam dengan jumlah penduduk sebanyak 534.202 jiwa atau 9,57 % dari jumlah penduduk Sumatera Barat dengan luas wilayah 4,29%, kepadatan penduduk 296 jiwa/km². Kabupaten dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak adalah

Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 509.618 jiwa, atau 7,06 % dari jumlah penduduk Sumatera Barat, dan luas wilayah 13,69% dengan kepadatan penduduknya sebesar 88 jiwa/km².

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021

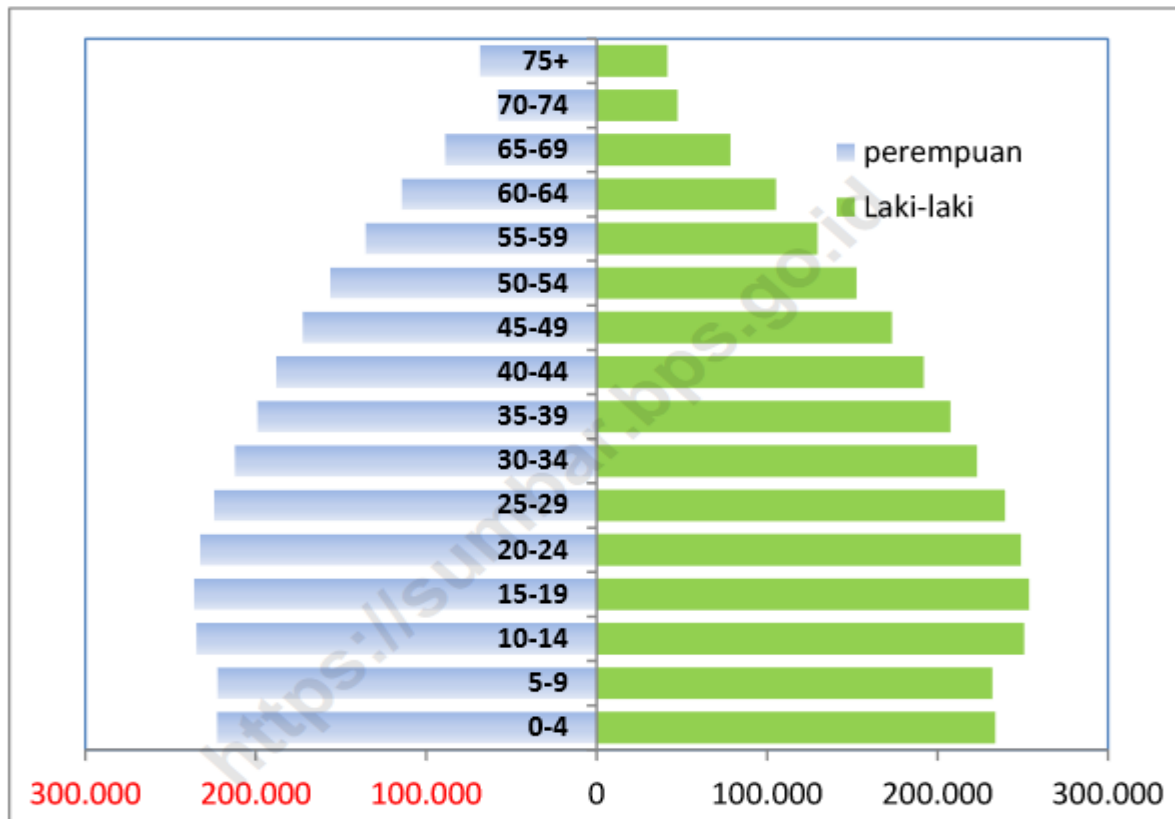
Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Wilayah	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Kabupaten					
Kep.Mentawai	6.011,35	14,31	88.389	1,58	14,70
Pesisir Selatan	5.749,89	13,69	509.618	9,13	88,63
Solok	3.738,00	8,90	394.237	7,06	105,47
Sijunjung	3.130,80	7,45	237.313	4,25	75,81
Tanah Datar	1.336,00	3,18	373.693	6,70	279,69
Padang Pariaman	1.332,51	3,17	433.018	7,76	324,96
Agam	1.804,30	4,29	534.202	9,57	296,07
Lima Puluh Kota	3.571,14	8,50	385.634	6,91	107,99
Pasaman	3.947,63	9,40	303.103	5,43	76,78
Solok Selatan	3.346,20	7,96	184.854	3,31	55,24
Dharmasraya	2.961,13	7,05	231.217	4,14	78,08
Pasaman Barat	3.887,77	9,25	436.313	7,82	112,23
Kota					
Padang	693,66	1,65	913.448	16,37	1.316,85
Solok	71,29	0,17	74.469	1,33	1.044,59
Sawahlunto	231,93	0,55	65.687	1,18	283,22
Padang Panjang	23,00	0,05	56.971	1,02	2.477,00
Bukittinggi	25,24	0,06	121.588	2,18	4.817,27
Payakumbuh	82,22	0,20	141.184	2,53	1.656,70
Pariaman	66,13	0,16	95.294	1,71	1.441,01
Sumbar	42.012,89	100,00	5.580.232	100,00	132,82

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2022

Kepadatan penduduk Sumatera Barat adalah 132 jiwa/km². Kota yang terpadat penduduknya di Sumatera Barat adalah Kota Bukittinggi yaitu dengan kepadatan 4.817 jiwa/km², diikuti oleh Kota Padang Panjang dengan kepadatan 2.477 jiwa/km² sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten

Kepulauan Mentawai dengan kepadatan 14 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Solok Selatan dengan kepadatan penduduk 55 jiwa/km². Sedangkan berikutnya adalah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 76 jiwa /km². Sementara kota dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kota Sawahlunto dengan kepadatan penduduk 283 jiwa/km².

Gambar 4.3. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber: BPS Sumatera Barat

Komposisi penduduk Sumatera Barat menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dengan piramida penduduk dibawah ini (Gambar 4.3). Sebahagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, dan didominasi oleh penduduk berusia 15-64 tahun sebesar 64,58 %. Sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas adalah sebesar 5,99 % dan usia 0-14 tahun sebesar 29,43%. Dengan demikian *dependency ratio* (rasio ketergantungan) Sumatera Barat sebesar 54,85, yang berarti setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun)

menanggung beban atau membiayai sebanyak 55 orang penduduk usia non produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Angka dependency ratio ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat belum memasuki era Bonus Demografi, diproyeksikan bonus demografi akan dicapai Sumatera Barat setelah tahun 2035. Namun di beberapa kota yaitu Padang dan Kota Bukittinggi sudah berada pada era bonus demografi dengan angka dependency ratio dibawah 50 yaitu masing-masing 42,23 dan 49,58.

Selanjutnya piramida penduduk Sumatera Barat menunjukkan proporsi balita usia 0-4 tahun pada tahun 2021 sebesar 9,87 %, sudah mengalami penurunan dari priode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengendalian penduduk sudah berdampak terhadap penurunan kelahiran, dan penduduk lansia usia enam puluh tahun keatas meningkat menjadi 9,25 %.

4.3. Gambaran Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Sumatera Barat

Sejak dicanangkan oleh Presiden tahun 2016 sampai akhir Oktober 2022 telah terbentuk sebanyak 696 Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat, yang telah mencakup sebesar 60% dari jumlah desa/nagari/kelurahan di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut 387 diantaranya adalah Kampung Keluarga Berkualitas yang berasal dari Kampung Keluarga Berencana yang terbentuk sampai akhir Desember 2021. Setelah program/kegiatan Penguatan Kemitraan di Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan dari awal tahun 2022 telah bertambah sebanyak 309 lagi Kampung Keluarga Berkualitas (Tabel 4.2).

Kabupaten/Kota yang sudah membentuk 100% Kampung Keluarga Berkualitas dari seluruh desa/nagari/pada pada Kabupaten/Kota tersebut ada sebanyak 6 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pasaman 37 Kampung Keluarga Berkualitas, Kabupaten Pasaman Barat 19 Kampung Keluarga Berkualitas, Kota Sawahlunto sebanyak 37 Kampung Keluarga Berkualitas, Kota Padang Panjang sebanyak 16 Kampung Keluarga Berkualitas, Kota Payakumbuh sebanyak 47 Kampung Keluarga Berkualitas, dan Kota Pariaman sebanyak 71 Kampung Keluarga Berkualitas.

Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang terbanyak saat ini adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebanyak 113 Kampung Keluarga Berkualitas. Jumlah ini baru

mencakup 62% dari total jumlah nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikutnya adalah Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Padang sebanyak 57 Kampung Keluarga Berkualitas yang mencakup 55% dari 104 kelurahan di Kota Padang.

Tabel 4.2. Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Sumatera Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Sampai 31 Des 2021	Tambahan 2022	Sampai 31 Ok 2022	Jumlah Desa/Nagari	Persen Terbentuk
Kabupaten					
Pesisir Selatan	51	62	113	182	62%
Solok	32		32	74	43%
Sijunjung	26		26	62	42%
Tanah Datar	17	11	28	75	37%
Padang Pariaman	22		22	103	21%
Agam	55		55	82	67%
Lima Puluh Kota	27	11	38	79	48%
Pasaman	24	13	37	37	100%
Kep.Mentawai	21	13	34	43	79%
Dharmasraya	27		27	52	52%
Solok Selatan	18		18	39	46%
Pasaman Barat	15	4	19	19	100%
Kota					
Padang	15	42	57	104	55%
Solok	3	9	12	13	92%
Sawahlunto	12	25	37	37	100%
Padang Panjang	3	13	16	16	100%
Bukittinggi	7		7	24	29%
Payakumbuh	6	41	47	47	100%
Pariaman	6	65	71	71	100%
Sumbar	387	309	696	1159	60%

Sumber: BKKBN Perwakilan Sumatera Barat

Menurut perkembangannya, Kampung Keluarga Berkualitas terbagi atas 4 klasifikasi, yaitu Klasifikasi Dasar, Berkembang, Mandiri, dan Berkelanjutan. Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Dasar adalah Kampung Keluarga Berkualitas yang pengelolaan input dan prosesnya masih belum efektif sehingga belum memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan program. Dari sebanyak 696 Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah terbentuk di

Sumatera Barat sebanyak 525 (75.43%) berada pada kategori Dasar, yang belum mampu menunjukkan pencapaian tujuan program (Tabel 4.4). Kampung Keluarga Berkualitas pada kategori berkembang artinya Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah berjalan sesuai dengan harapan namun belum berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program., yaitu sebanyak 72 (10.343%).

Tabel 4.3 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Menurut Klasifikasi di Sumatera Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Dasar		Berkembang		Mandiri		Berkelanjutan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kabupaten									
Pesisir Selatan	100	88	8	7	4	3	1	0	113
Solok	27	84	2	6	1	3	2	6	32
Sijunjung	11	42	4	15	2	7	9	34	26
Tanah Datar	15	53	1	1	6	21	6	21	28
Padang Pariaman	15	68	6	27	0	0	1	4	22
Agam	43	78	12	21	0	0	0	0	55
Lima Puluh Kota	22	57	3	7	6	15	7	18	38
Pasaman	23	62	12	32	0	0	2	5	17
Kep.Mentawai	33	97	1	2	0	0	0	0	34
Dharmasraya	11	40	2	7	1	3	13	48	27
Solok Selatan	13	72	1	5	3	16	1	5	18
Pasaman Barat	9	47	6	31	0	0	4	21	19
Kota									
Padang	42	73	6	10	0	0	9	15	57
Solok	9	75	0	0	1	8	2	16	12
Sawahlunto	29	78	2	5	2	5	4	10	37
Padang Panjang	12	75	2	12	0	0	2	12	16
Bukittinggi	3	42	1	14	3	42	0	0	7
Payakumbuh	40	85	1	6	1	2	3	6	47
Pariaman	68	95	0	0	1	1	2	2	71
Sumbar	525	75.43	72	10.34	31	4.45	68	9.77	696

Sumber: BKKBN Perwakilan Sumatera Barat

Kampung Keluarga Berkualitas yang berada pada kategori Mandiri, adalah Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah memberikan kontribusi pada pencapaian program, yaitu

sebanyak 31 (4.45%). Kampung Keluarga Berkualitas pada Kategori Berkelanjutan adalah Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah berjalan dengan baik dan sudah berkontribusi dalam pencapaian program, yaitu sebanyak 68 (9.77%).

Tabel 4.4. Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Menurut Keterlibatan Lintas Sektor di Sumatera Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Terintegrasi 1-3 Lintas Sektor	Terintegrasi 4-7 Lintas Sektor	Terintegrasi >7 Lintas Sektor	Belum Mengisi	Jumlah
Kabupaten					
Pesisir Selatan	5	8	13	87	113
Solok	3	5	2	22	32
Sijunjung	4	6	10	6	26
Tanah Datar	3	7	4	14	28
Padang Pariaman	6	1	4	11	22
Agam	10	10	3	32	55
Lima Puluh Kota	6	9	13	10	38
Pasaman	6	8	13	10	37
Kep.Mentawai	1	4	3	26	34
Dharmasraya	9	10	5	3	27
Solok Selatan	0	3	5	10	18
Pasaman Barat	3	3	9	5	19
Kota					
Padang	0	0	15	42	57
Solok	0	2	2	8	12
Sawahlunto	0	3	7	27	37
Padang Panjang	1	1	5	9	16
Bukittinggi	1	5	1	0	7
Payakumbuh	2	5	5	35	47
Pariaman	0	1	5	65	71
Sumbar	60	90	124	422	696

Sumber: BKKBN Perwakilan Sumatera Barat

Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas menurut integrasi lintas sektor, yaitu banyaknya sektor berkolaborasi dibagi atas 3 kategori, yaitu Integrasi 1-3 Lintas Sektor, kategori Integrasi 4-7 Lintas Sektor, dan kategori Integrasi lebih dari 7 Lintas Sektor. Dari 696 Kampung Keluarga Berkualitas, terdapat 60 (8.6%) Kampung Keluarga Berkualitas yang

terintegrasi 1-3 Lintas Sektor, 90 (12.9%) terintegrasi 4-7 Lintas Sektor, dan 124 (17.8%) terintegrasi lebih dari 7 Lintas Sektor (Tabel 4.4).

Dari data terlihat bahwa pelaksanaan integrasi konvergensi lintas sektor masih belum berjalan sesuai dengan harapan. 274 (39.4%) Kampung Keluarga Berkualitas yang memastikan adanya integrasi lintas sektor, sementara 422 (60.6%) Kampung Keluarga Berkualitas lainnya belum memberikan laporan tentang integrasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Walaupun diketahui bahwa sebahagian besar adalah Kampung Keluarga Berkualitas yang baru terbentuk, namun hal ini dapat memberikan indikasi bahwa integrasi lintas sektor merupakan aktivitas yang mudah direncanakan tetapi sulit untuk implementasikan di lapangan. Kekuatan egosektor masih kuat dan memerlukan intervensi tersendiri dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.

Sektor perlu mamahami bahwa kegiatan bersama di Kampung Keluarga Berkualitas tidak akan mengurangi capaian indikator kinerja masing-masing sektor, malahan akan meningkat kinerja karena banyak aktivitas yang dikerjakan bersama menjadi lebih efisien. Kegiatan sektor yang sudah ada tidak akan terganggu dengan munculnya program Kampung Keluarga Berkualitas karena masing-masing sektor akan melaksanakan program dan kegiatannya seperti sedia kala. Perbedaannya hanya pada lokus kegiatan. Bila selama ini kegiatan tiap sektor dilaksanakan pada lokus-lokus yang terpencar, sekarang kegiatan yang sama dilakukan pada lokus yang sama, yaitu Kampung Keluarg Berkualitas. Integrasi terdapat pada cara berkolaborasi, sedangkan konvergensi terletak pada lokus pelaksanaan kegiatan.

4.4. Model Solusi Strategis Integrasi dan Konvergensi

Integrasi dan Konvergensi pelaksanaan pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas adalah pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, terkoordinir, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas keluarga pada kelompok sasaran prioritas di Kampung Keluarga Berkualitas. Sesuai amanat Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas adalah: 1) Penyediaan data dan dokumen kependudukan, 2) Perubahan perilaku, 3) Peningkatan cakupan layanan dan rujukan kepada keluarga, dan 4) Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sasaran program tersebut diwujudkan dalam 8 program Kampung Keluarga Berkualitas, yaitu 1) Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan, 2) Penguatan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat & Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat, 3) Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 4) Pendampingan dan Pelayanan Keluarga Beresiko Stunting, 5) Peningkatan Cakupan dan Akses Pendidikan, 6) Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan dan Perlindungan Sosial, 7) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan 8) Penataan Lingkungan Keluarga, dan Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Dasar.

Implementasi ke delapan program tersebut membutuhkan banyak lembaga, mulai dari tingkat desa/nagari sampai ke tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat desa/nagari dibutuhkan lembaga yang akan mengelola program tersebut. Pada masing-masing Kampung Keluarga Berkualitas terdapat Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa/nagari. Struktur dan Tanggungjawab masing-masing Pokja sudah diatur pada periode Kampung Keluarga Berkualitas. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota diperlukan lagi Pokja Tingkat Kabupaten/Kota. Pokja Tingkat Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang akan melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal terkait dan lembaga masyarakat lainnya.

Bila integrasi dan konvergensi diartikan sebagai pemusatan program dan kegiatan pada satu titik sasaran yaitu Kampung Keluarga Berkualitas, maka integrasi adalah penyatuan semua lembaga lintas sektor terkait yang akan berkolaborasi secara sinergis melakukan program dan kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan demikian keberadaan kedua kelompok kerja tersebut merupakan dua pilar utama penentu keberhasilan integrasi dan konvergensi lintas sektor. Kampung Keluarga Berkualitas akan optimal bila terdapat kolaborasi yang intensif antara Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa/Nagari dengan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten/Kota.

Pokja Tingkat Desa/Nagari merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kampung Keluarga Berkualitas masing-masing (*demand side*). Sedangkan Pokja Tingkat Kabupaten/Kota merancang dan menyepakati program/kegiatan Kampung Keluarga

Berkualitas (*supply side*). Pertemuan antara *demand side* dan *supply side* akan menghasilkan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan terpadu pada Kampung Keluarga Berkualitas (Gambar 4.4). Komitmen bersama secara operasional dituangkan dalam Matriks Integrasi dan Konvergensi. Pada Matriks tersebut tercermin program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas dan tercermin lembaga yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

Gambar 4.4: Model Integrasi Konvergensi Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas



Komitmen bersama para pemangku kepentingan akan mengikat masing-masing lembaga atau pemangku kepentingan untuk mengalokasikan program/kegiatan dan anggaran dari masing-masing untuk diarahkan kepada program dan kegiatan yang sudah disepakati bersama sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab lembaga tersebut. Komitmen bersama ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan terpadu yang ditujukan pada Kampung Keluarga Berkualitas dalam kabupaten/kota tersebut. Rencana program dan kegiatan terpadu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan jenis kegiatan, tempat, dan waktu yang telah ditetapkan atau dilaksanakan secara bersama pada tempat dan waktu tertentu.

Setidaknya terdapat 11 lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas ditingkat Kabupaten/Kota, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tim Penggerak PKK, dan Kantor Kementerian Agama (Gambar 4.5).



Gambar 4.5: Keterlibatan Lintas Sektor Dalam Program Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas

Disamping organisasi perangkat daerah dan organisasi yang terlibat langsung, organisasi lain yang terlibat secara tidak langsung dapat diikutsertakan di dalam kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas, diantaranya adalah organisasi vertikal lain yang berweilayah tugas di kabuopate/kota tersebut, organisasi pengusaha, organisasi perantau, dan organisasi non pemerintah yang menrauh perhatian kepada pembangunan keluarga.

4.5. Matriks Integrasi Konvergensi

Matriks integrasi dan konvergensi dimaksudkan sebagai instrumen pemaduan program/kegiatan bersama pemangku kepentingan yang terhimpun dalam Pokja tingkat kab/kota, yang akan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, membuat komitmen bersama, dan menuangkan dalam sebuah matriks integrasi dan konversi sebagai dokumen kesepakatan bersama (Gambar 4.6). Matriks Integrasi Konvergensi menjelaskan siapa mengerjakan apa pada program Kampung Keluarga Berkualitas. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga tidak akan mengganggu program dan kegiatan yang ada di masing-masing sektor sesuai kewenangannya. Perbedaannya hanya terletak pada tempat dan waktu. Bila selama ini masing-masing lembaga melakukan kegiatan pada tempat yang berbeda-beda satu sama lainnya, maka pada program Kampung Keluarga Berkualitas, program dan kegiatan masing-masing sektor dilaksanakan pada lokus yang sama yaitu Kampung Keliarga Berkualitas. Sedangkan waktu kegiatan disepakati secara bersama untuk menghindari tumpang tindih kegiatan.

Tabel 4.6: Matriks Integrasi Konvergensi Program/Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB

No	Program Keluarga Berkualitas	Pemangku Kepentingan Terkait												
		Dinas Duk Capil	Dinas P3A P2KB	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Dinas PUPR Perkim	Din Sos PMD	Dinas Perta/Perikanan	Dinas Kop UMKM	Dinas Lingkh Hidup	Kem nag PA	TP PKK	Instansi Vertikal Lain	Organisasi Masy
1	Penyediaan Data dan Dokumen Kendudukan	√		√			√				√			
2	Gemas & Komunikasi Perubahan Perilaku		√	√	√		√			√	√		√	√
3	Akses & Pelayanan Kesehatan dan KB		√	√										
4	Pelayanan Keluarga Beresiko Stunting		√	√	√	√	√	√						
5	Peningkatan Akses Pendidikan				√						√			
6	Peningkatan Cakupan Perlindungan Sosial						√							√
7	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		√						√	√			√	√
8	Lingkungan, Air Bersih & Sanitasi			√		√				√				

Kesepakatan yang dihasilkan pada matriks Integrasi dan Konvergensi dijabarkan secara operasional dalam kegiatan terpadu untuk masing-masing kelompok program/kegiatan dari 8 program/kegiatan pada Rencana Aksi Program Kampung Keluarga berkualitas.

4.6. Rencana Aksi

Rencana Aksi pelaksanaan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan secara terkoordinir dibawah Pokja Tingkat Kab/Kota. Pelaksanaan Aksi Integrasi dan Konvergensi meliputi tahapan: 1) Analisis Situasi, 2) Perencanaan Kegiatan, 3) Rapat Koordinasi, 4) Dukungan Regulasi, 5) Pembinaan Kader, 6) Manajemen Data, 7) Review Kinerja Tahunan, dan 8) Pengukuran Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pada tahap **Analisis Situasi** dilakukan pengumpulan informasi tentang situasi dan kondisi masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada masing-masing Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam hal ini Pokja Tingkat desa/nagari mempunyai peranan penting untuk mengumpulkan semua data dan permasalahan di Kampung Keluarga Berkualitas masing-masing. Analisis situasi menggambarkan kondisi Kampung Keluarga Berkualitas yang meliputi jumlah penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, perlindungan sosial, dan administrasi kependudukan. Untuk Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah mempunyai Rumah Dataku semua informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari Rumah Dataku. Kerjasama antara Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dengan Poktan Rumah Dataku sangat diperlukan.

Semua informasi yang diperoleh dari Pokja Tingkat Desa/Nagari menjadi masukan bagi Pokja Kabupaten/Kota untuk menyusun **Perencanaan Kegiatan** bersama berdasarkan program/kegiatan masing-masing lembaga sesuai dengan lampiran Inpres Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Rencana kegiatan masing-masing lembaga dikoordinasikan oleh Pokja Tingkat Kabupaten/Kota untuk membentuk kesepakatan bersama pelaksanaan program/kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas. Dalam hal ini sangat diperlukan inisiatif dan proaktif ketua pokja untuk melakukan kordinasi mengumpulkan semua program/kegiatan masing-masing dinas untuk dihimpun dalam suatu kegiatan terpadu Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

Hasil rumusan program/kegiatan Pokja Tingkat Kabuoate/Kota di bahas dalam suatu **Rapat Koordinasi** yang berfungsi sebagai wadah sinkronisasi dan konvergensi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas. Pelaksanaan rapat pada tingkat kabupate/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota, yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dan termasuk Pokja Tingkat Kampung Keluarga Berkualitas. Rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama semua pemangku kepentingan untuk bersama sama melakukan aktivitas terpadu dalam membangun Kampung Keluarga Berkualitas.

Dukungan Regulasi diperlukan sebagai payung hukum untuk menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas. Pada tingkat Kabupaten/Kota diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur pelaksanaan, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan program/kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan peraturan Bupati/Walikota semua pemangku kepentingan mempunyai kekuatan hukum dalam menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada tingkat desa juga perlu disusun peraturan desa sebagai dasar dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa/nagari.

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Oleh sebab itu perludilakukan **Pembinaan Kader** terhadap kader masing-masing dinas atau sektor terkait yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas baik Pokja tingkat Desa/Nagari maupun Pokja tingkat Kabupaten/Kota. Pembinaan kader dapat dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan dengan berbagai metode seperti pelatihan, lokakarya, asistensi, dan bimbingan teknis.

Sistem Manajemen Data berbasis teknologi informasi sangat diperlukan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan integrasi dan konvergensi di Kampung Keluarga Berkualitas. Selain sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh BKKBN ditingkat pusat, dalam ruang lingkup kabupaten/kota perlu di kembangkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data setiap Kampung Keluarhga Berkualitas sebagai bahan pengambil kebijakan tidak hanya untuk program Kampung Keluarga Berkualitas, namun dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan sektor lainnya di kabupate/kota tersebut.

Review kinerja optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terencana baik dari sisi pelaksana, metode, serta manfaat monev bagi upaya perbaikan program. Pelaksanaan monev dilakukan oleh tim yang dibentuk instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara pemantauan dengan website Kampung Keluarga Berkualitas, melalui forum pertemuan, atau melalui kunjungan langsung ke lapangan. Temuan pada saat monitoring merupakan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi program. Hasil temuan ditindak lanjuti dengan penyesuaian, perbaikan, ataupun perubahan dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan peningkatan kualitas keluarga dapat dicapai.

Pengukuran keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas dilihat dari nilai indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang diukur setiap tahun oleh pendataan keluarga oleh BKKBN. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu ukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

4.7. Tanggungjawab Kelompok Kerja

Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa/Nagari bertanggungjawab mengumpulkan data menyangkut semua aspek pembangunan keluarga yang meliputi: data potensi desa, data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data pembangunan keluarga, data perlindungan sosial, dan data administrasi kependudukan. Berdasarkan data tersebut Pokja Tingkat Desa/Nagari merumuskan permasalahan terkait keluarga berkualitas dari seluruh sektor pembangunan yang terkait. Permasalahan yang telah dirumuskan diurutkan mulai dari prioritas tertinggi sampai yang terendah. Pokja Desa/Nagari bertanggungjawab menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pokja Tingkat Kab/Kota.

Data yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan Kampung Keluarga Berkualitas adalah data yang sudah dikumpulkan melalui Rumah Dataku pada masing-masing Kampung Keluarga Berkualitas. Untuk data potensi desa mencakup: data fasilitas pendidikan/sekolah, fasilitas kesehatan/posyandu, fasilitas olah raga, fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi/pasar, dan prasarana umum/jalan. Data kualitas penduduk mencakup: jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, kelahiran dan kematian, pernikahan perceraian, dan data peserta keluarga berencana.

Data kualitas penduduk mencakup: jumlah anak bersekolah, jumlah anak putus sekolah, jumlah cakupan imunisasi, jumlah gizi buruk atau stunting, pendapatan penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah penganggur. Data perpindahan penduduk mencakup: jumlah penduduk masuk, jumlah penduduk keluar, jumlah penduduk komuter, jumlah penduduk musiman, jumlah perpindahan penduduk netto, jumlah penduduk per luas wilayah, jumlah penduduk per luas lahan pertanian. Data pembangunan keluarga mencakup: jumlah anggota keluarga, jumlah tribina, jumlah kelompok pemberdayaan, jumlah fasilitas kebersihan, jumlah fasilitas air bersih dan sanitasi, cakupan MCK keluarga. Data perlindungan sosial mencakup: jumlah penerima KKS, penerima BPJS, penerima PKH, penerima Raskin, penerima KIS/PBI, penerima Jamkes daerah. Serta data kependudukan mencakup: jumlah penduduk memiliki KTP, jumlah keluarga memiliki KK, memiliki kartu nikah, memiliki KIA, memiliki akta kelahiran, akta kematian.

Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengidentifikasi komponen-komponen program dan kegiatan pembangunan masing-masing sektor yang akan ditujukan untuk pembangunan keluarga berkualitas sesuai dengan data dan permasalahan yang diajukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dan sesuai dengan program dan kegiatan pada Inperes No. 3 Tahun 2022. Selanjutnya Pokja Tingkat Kab/kota mengidentifikasi keterlibatan sektor-sektor terkait yang mencakup lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga masyarakat sesuai dengan kontribusi yang dapat disediakan oleh lembaga tersebut. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan akan menghasilkan komitmen bersama untuk melaksanakan program/kegiatan terpadu serta menempatkan siapa mengerjakan apa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

Masing-masing lembaga pemangku kepentingan terkait dapat menyusun kegiatan operasional untuk melaksanakan komitmen yang sudah disepakati bersama pada masing-masing Kampung Keluarga Berkualitas. Penentuan jadwal kegiatan disepakati oleh lembaga/organisasi anggota Pokja Kab/kota dengan masing-masing Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa/Nagari. Dengan pengaturan pelaksanaan program/kegiatan terpadu, pertanggungjawaban sektoral masing-masing dinas/organisasi perangkat daerah tetap dilaksanakan sebagai mana biasa. Semua lembaga mendapatkan benefit dari pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas.

Akumulasi kegiatan sektor pada Kampung Keluarga Berkualitas akan mempercepat pencapaian baik Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta pencapaian target pelaksanaan standar pelayanan minimal (IPM) masing-masing

dinas/sektor karena sasaran kelompok penerima pelayanan adalah sasaran yang tepat yang secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator-indikator yang digunakan. Walaupun pelaksanaan kegiatan secara terpadu, namun tidak mengurangi pencapaian target-target yang sudah ditetapkan masing-masing dinas. Sinergi yang dilakukan secara kolaboratif justru akan mempercepat pencapaian target-tager yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, Program Kampung Keluarga Berkualitas, akan mempercepat pencapaian target-target semua organisasi perangkat daerah yang terlibat di dalamnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas akan dapat diwujudkan apabila terdapat integrasi konvergensi lintas sektor dalam pelaksanaan program keluarga berkualitas pada setiap Kampung KB.
2. Mekanisme integrasi konvergensi lintas sektor dilakukan melalui pertemuan antara permasalahan yang dikumpulkan melalui Pokja Tingkat Desa/Nagari (*demand side*) dengan program/kegiatan yang tersedia pada Pokja Tingkat Kabupaten/Kota (*supply side*) yang menghasilkan komitmen bersama yang dituangkan dalam Matriks Integrasi dan konvergensi untuk melaksanakan kegiatan terpadu pada Kampung Keluarga Berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pokja Tingkat Desa/Nagari agar menjalankan fungsinya sebagai kelompok kerja yang menghimpun berbagai permasalahan di Kampung Keluarga Berkualitas secara rutin dari berbagai sektor berbsiskan data Kampung Keluarga Berkualitas.
2. Pokja Tingkat Kabupaten/Kota agar dapat mempertemukan antara kebutuhan penyelesaian masalah di Kampung Keluarga Berkualitas dengan Potensi dan Sumberdaya yang tersedia pada setiap sektor terkait di tingkat Kabupaten/Kota untuk melahirkan komitmen bersama yang dituangkan dalam bentuk Matriks Integrasi dan Konvergensi berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pokja Tingkat Desa/Nagari.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Agranoff, Robert & Michael McGuire, 2003, Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown University Press, Washington, D.C.
2. BKKBN. 2015. Juknis Kampung Keluarga Berencana., Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
3. BKKBN. 2020. Tentang Kampung Keluarga Berkualitas. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
4. BKKBN. 2022. Modul 3 Kampung Keluarga Berkualitas. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
5. Butler, J. 2020. Five Components to Team Synergy. <https://www.dentaltown.com/magazine/article/5580/five-components-to-team-synergy>
6. Corning, P.A. 2007. Synergy and self-organization in the evolution of complex systems. *Systems Research* 12(2). DOI: 10.1002/sres.3850120204.
7. Covey, S. R. 1997. 7 Habits of Highly Effective People, Restoring the Character Ethic. Simon & Schuster, London.
8. Dearthoff, D.S., & Williams, G. (2006). Synergy Leadership in Quantum Organizations. Fesslerdorff Consultants.
9. Fendt, T. C. 2010. Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries. Berlin: Univ. der Technischen Universitat Berlin.
10. Goold, M. and Campbell, A. (2000), "Taking stock of synergy-a framework for assessing linkages between businesses", *Long Range Planning*, Vol. 33(1).
11. Harley, James & Blismas, Nick, 2010, An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), e-Research Collaboration: Theory, Techniques and Challengers, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
12. Harrison, D., Holmen, E. and Pedersen, A.C. (2010), "How Companies Strategise Deliberately in Networks Using Strategic Initiatives", *Industrial Marketing Management*, Vol. 39 No. 6.
13. Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
14. Krishna, A. 2003. Partnerships Between Local Governments and Community-Based Organisations: Exploring The Scope for Synergy. *Public Administration and Development* 23. John Wiley & Sons, New York.
15. Martin, J. 2021. Beyond the buzzword: how to build team synergy. <https://asana.com/resources/what-is-synergy>
16. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

17. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
18. Wanna, J. 2008. Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia. Australian National University E Press, Canberra.
19. Yosrizal. 2022. Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Makalah Workshop Kampung Berkualitas, Padang.
20. Yayasan Cipta Cara Padu. 2017. Kampung Keluarga Berencana, Upaya Nyata Membangun Bangsa. YCCP, Jakarta.
21. Zastrow, Charles. 2007. Introduction to Social Welfare Institutions (Social Problems, Services, and Current Issues). Fourth Edition. Homewood, Illinois.